

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat diselesaikan. RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2023 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2023 ini, diucapkan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

DAFTAR ISI

KATAR PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3. Program Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	48

BAB I

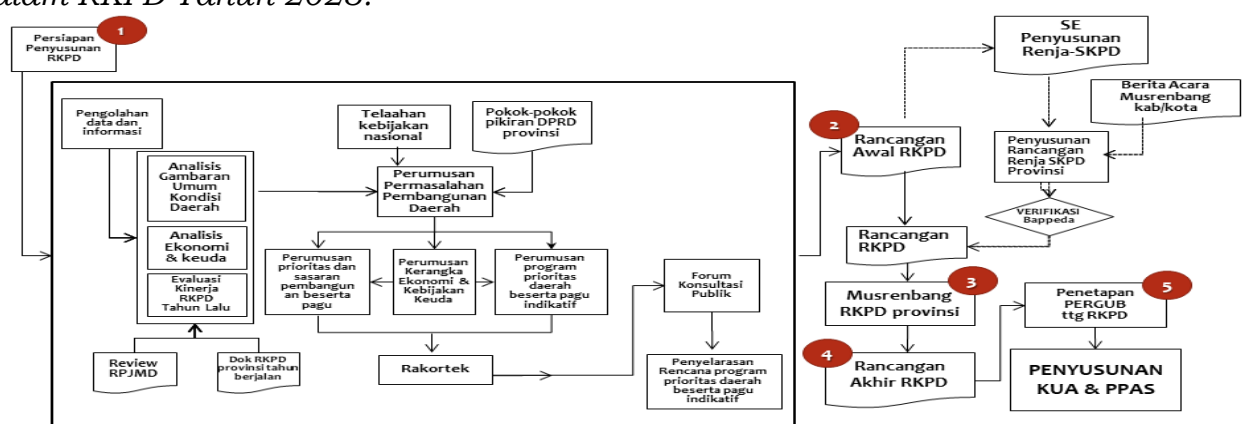
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Proses penyusunan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023.



6. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
7. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
8. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);*
9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);*
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);*
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
13. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);*
14. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);*

15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);*
16. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);*
17. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;*
18. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);*
19. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);*
20. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
21. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);*
22. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466) ;*

23. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);*
24. *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);*
25. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);*
26. *Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);*
27. *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);*
28. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);*
29. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);*
30. *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 33);*

31. *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa*(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional;*
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;*
- c. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.*

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja tahun lalu.

Review pada Renja tahun 2022 melihat pada capaian kinerja outcome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2019)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	15,20 %		78,37%	78,37%	100	78,49%	15,20 %	100
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %		416 Dokumen	416 Dokumen	100	416 Dokumen	100 %	100
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	1 buah		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 buah	100
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK	216 Orang		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	216 Orang	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dana operasional	24 Balai		3					

		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64 %		15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	64 %	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	94 %		15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	94 %	100
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	30,37 %		45 Dokumen	45 Dokumen	100	45 Dokumen	30,37 %	100
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	83,73 %		35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	83,73 %	100
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	156 Faskes		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	156 Faskes	100
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	10 orang		2 unit	2 unit	100	2 unit	10 orang	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,74 %		1 unit	1 unit	100	1 unit	42,74 %	100
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	30 kasus		6 unit	6 unit	100	6 unit	30 kasus	100
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	20 Unit		6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	20 Unit	100
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pas									

	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21 Tahun		93,96%	93,96%	100	93,96%	21 Tahun	100
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola POKTAN yang dibina	38 orang		11,00%	11,00%	100	11,00%	38 orang	100
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	1152 orang		75,00%	75,00%	100	75,00%	1152 orang	100
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	21 unit		50 PD	50 PD	100	50 PD	21 unit	100
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	5 kelompok		50 PD	50 PD	100	50 PD	5 kelompok	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	96 Kelompok		55 Buah	55 Buah	100	55 Buah	96 Kelompok	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	9 kelompok		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	9 kelompok	100
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	20 %		0,10%	0,10%	10			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	8,47%	8,47%	100	8,47%	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	3 Dokumen	1 media	1 media	100	1 media	3 Dokumen	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	350 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	350 Dokumen	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Dokumen	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	3 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	3 Dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	56 Orang	24 orang	24 orang	100	24 orang	56 Orang	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis	1 Dokumen	100%	100%	100	100%	1 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	77 Dokumen	12 Kasus	12 Kasus	100	12 Kasus	77 Dokumen	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Dokumen	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	615 point	615 point	100	615 point	48 Dokumen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik							

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen		1	1	100	1	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	2 Dokumen		2	Media	2	Media	2 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen						2 Dokumen	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	71,43 %		16,91%		16,91%		71,43 %	100
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	40 OPD		21	Tahun	21	Tahun	40 OPD	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	40 OPD		38	orang	38	orang	40 OPD	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	50 Buah		1152	orang	1152	orang	50 Buah	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Dokumen		27	unit	27	unit	1 Dokumen	100
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	40 OPD		1	kelompok	1	kelompok	40 OPD	100
		Peningkatan pers								

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %		10	OPD	10	OPD	100	10 OPD	100 %	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	12 Kasus		4	Mitra	4	Mitra	100	4 Mitra	12 Kasus	100
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Laporan		71,16%		71,16%		100	71,16%	12 Laporan	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	100		38	orang	38	orang	100	38 orang	100	100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	100		64%		64%		100	64%	100	100
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	2 Media		95%		95%		100	95%	2 Media	100
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	12 Dokumen		28,71%		28,71%		100	28,71%	12 Dokumen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	0,037 %		10	orang	10	orang	100	10 orang	0,037 %	100
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak										

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	4 Sekolah		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Sekolah	100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	3 buah		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	3 buah	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	1 lembaga		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 lembaga	100
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	10 orang		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	10 orang	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki lima indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Ukuran keberhasilan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai wujud pelayanan perangkat daerah yang diemban ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama, adapun analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi					28,70%	28,80%			28,70%	28,80%	
1.1.	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A					BB	BB	BB	BB	BB	BB	
1.1.1.	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A					78,61	78,73	78,37	78,49	78,61	78,73	
2	Indeks Pembangunan Gender					93,79%	93,96%	93,76	93,65	93,79%	93,96%	
2.1.	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD					8,19%	11,00%	14%	7,72%	8,19%	11,00%	
2.1.1.	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD					71,43%	75,00%	32,48%	53,44%	71,43%	75,00%	
2.1.2.	Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya			5,7%	5,8%	0,90%	0,10%	5,7%	0	0,90%	0,10%	
2.1.3.	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga											

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (outcome) dan target kinerja kegiatan (output) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. *Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.*
- b. *Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang masih rendah, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.*
- c. *Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.*
- d. *Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.*

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. *Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.*

- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinas dengan berbagai stakeholder;
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan pendekatan bagian-bagian, yaitu:

TABEL 2.3.

Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<i>Pengendalian Penduduk</i>	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat
2.	<i>Keluarga Berencana</i>	3. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local 4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan Keluarga Berencana belum optimal 5. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal 6. Persentase Unmeet Need masih tinggi 7. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 8. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	<i>Keluarga Sejahtera</i>	7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9. Kualitas kader/ tenaga pendamping belum optimal 10. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 11. Pembinaan terhadap kader belum optimal Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)
4.	<i>Kualitas Hidup Perempuan</i>	9. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah 10. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 11. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Anggaran yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan kurang optimal 14. Bahan informasi dan sosialisasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Perlindungan perempuan	12. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan 14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	15. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak 17. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang
7.	Sistem Data Gender dan Anak	18. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	17. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
8.	Pemenuhan Hak Anak	19. Pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	18. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
9.	Perlindungan Khusus Anak	21. Pencegahan kekerasan terhadap anak 22. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 23. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	19. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 20. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang

Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”, untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut.

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renja DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki kontribusi untuk mewujudkan visi bupati dan wakil bupati pada misi pertama yaitu SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS, misi ke dua SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI, misi ke tiga SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI dan misi ke empat yaitu SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA.

Selanjutnya dari uraian-uraian diatas diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Tantangan dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan DP2KBP3A

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
1	Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menguatnya tuntutan publik akan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan perangkat daerah yang semakin baik	Peraturan/Keputusan/instruksi Bupati yang mengatur/menetapkan tentang intervensi atau keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung program KKBPK dan PPPA
			Pencanangan Kabupaten Sumbawa Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
2	Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Lemahnya kapasitas kelembagaan	Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif. Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
3	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya sistem evaluasi pada tingkat perangkat daerah	Semakin menguatnya tuntutan akan ketersediaan sistem, yang memberikan ruang kreasi bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja anak, serta munculnya kekerasan di media online
4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Tema pembangunan RKPD 2023 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemantapan Pelayanan Dasar, Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pengembangan Inovasi”**, dimana dukungan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam terwujudnya tema pembangunan tersebut adalah melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Peningkatan

ekonomi melalui pengembangan produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya, Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, khususnya yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, dan program / kegiatan, serta indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang menjadi cacatan untuk disesuaikan pada perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																Target	Pagu Indikatif		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Persentase PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD Peningkatan Persentase Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik ekonomi sosial dan budaya	% %		% %	82.14 % 0.11 %	70,130,000					82.14 % 0.11 %	267,089,641		
2	08																		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	12,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-D								

